

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urgensi Koperasi Wanita

Eksistensi dan keberhasilan koperasi tidak dapat terkonstruksi jika keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Akseptabilitas masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menjadi bagian yang senyawa dengan koperasi. Kebersatuan masyarakat sebagai anggota koperasi merupakan wujud kepercayaan mereka kepada pengurus koperasi dan sebaliknya. Dalam konteks ini, prinsip mutualistik dan saling membutuhkan, baik materi atau non materi, menggambarkan hubungan pertukaran yang terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan yang jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang R, 2006). Hubungan yang diikat oleh *trust* antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya (Siswoyo, 2004). Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan.

Koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Begitu juga koperasi eksis, bertahan, dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Eksistensi Kopwan dapat digambarkan dari bagaimana eksistensi bahkan kemajuan yang telah dicapai oleh dua kopwan yang ada di Pulau Jawa, yaitu; 1) Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya, dan 2) Kopwan Kartika Chandra Pandaan (KCP). Keberhasilan Kopwan yang pertama, antara lain, ditentukan oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai tersebut telah mendorong Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 provinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 225 juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. Sedangkan Kopwan yang nomor dua dinilai berhasil karena sehatnya pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan-pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003–2004 lalu (Sutojo, 2005).

Keberhasilan di atas tentu menunjukkan bahwa wanita, sebagai pengelola

koperasi, memiliki keunggulan. Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan Kopwan. Kasus keberhasilan yang dijelaskan juga merupakan contoh bagaimana dampak koperasi wanita terhadap lingkungan dan anggota koperasi. Melalui dampak keberhasilan mereka diharapkan dapat dipetik pembelajaran yang telah dicapai kopwan. Pembelajaran berguna untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam mendorong perkembangan Kopwan di masa mendatang.

Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, di samping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita. Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang erat, karenanya, peranan wanita perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan beberapa alasan, yaitu: a) wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan, b) wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan c) wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekadar sebagai ibu rumah tangga.

Kaitan antara wanita dan koperasi, karenanya, kerap memunculkan pertanyaan yang menarik bahwa apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial) mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat berjalan lebih baik atau tidak. Pertanyaan ini secara sekilas dapat dijawab dengan melihat keberadaan koperasi wanita secara nasional melalui sejumlah peubah yang meliputi unsur-unsur, a) jumlah Koperasi Wanita, b) jumlah anggota Koperasi Wanita, c) jenis usaha Koperasi Wanita, d) pelaksanaan RAT, e) modal Koperasi Wanita, f) volume usaha, g) Sisa Hasil Usaha (SHU), h) umur Koperasi Wanita, i) jumlah manajer, j) jumlah karyawan, dan k) keuangan/solvabilitas. Beberapa unsur peubah di atas tentu menjadi indikator yang dapat menunjukkan bahwa kemampuan dan keuletan yang melekat dalam diri wanita cukup memberikan jawaban atas kegelisahan banyak pihak, dan sekaligus di sinilah urgensi eksistensial koperasi yang berada di bawah kendali para wanita.

2.2 Keberadaan Koperasi Wanita

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam

koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM--sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang--telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya, seperti pada tahun 2004/2005, adalah program rintisan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang responsif gender melalui aliran dana penguatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dilaksanakan secara meluas yang mencakup 30 provinsi, yaitu: NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara.

Program yang menjadi target Pemerintah di atas, dalam implementasinya, juga telah menjadi agenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk 8.506 LKM Koperasi Wanita dengan bantuan modal sebesar @Rp. 25 juta. Kemudian pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah kembali memberikan tambahan bantuan modal kepada 3.000 Koperasi Wanita yang telah menampilkan kinerja yang baik dengan tambahan modal sebesar @Rp. 25 juta. Sehingga sampai tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, melalui APBDnya, telah menginvestasikan modal publik untuk penyediaan keuangan mikro di desa/kelurahan di Jawa Timur sejumlah 8.506 dengan total anggaran sebesar Rp. 287,650 milyar. Sedangkan pada tahun 2014 program penguatan modal kembali diagendakan untuk 4.000 Kopwan yang masing-masing mendapat kucuran dana sebesar Rp. 25 juta. Namun, bantuan modal koperasi hanya diberikan kepada Kopwan yang belum memperoleh tambahan modal dengan ketentuan bahwa Kopwan tersebut memiliki kinerja cukup baik.

Keberadaan koperasi tersebut dipengaruhi oleh faktor intensitas pembinaan dari lembaga yang berkompeten untuk mendorong pembangunan koperasi di Jawa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Gambaran koperasi dapat dilihat secara nyata melalui data, yang menampilkan a) jumlah anggota 320.740 orang, jadi rata-rata jumlah anggota kopwan 165 orang, b) jumlah manajer wanita 312 orang dan jumlah manajer laki-laki 52 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah Kopwan, maka Kopwan yang memiliki manajer hanya 15 persen (%), koperasi yang 85% tidak memiliki manajer, langsung ditangani pengurus, dan c) jumlah karyawan sebanyak 3.027 terdiri dari karyawan perempuan sebanyak 1774 orang dan karyawan laki-laki

sebanyak 253 orang. Dibanding dengan jumlah kopwan maka setiap kopwan memiliki karyawan rata-rata 1 sampai 2 orang (4) Jumlah modal kopwan sebesar Rp. 1,9 trilyun.

2.3 Jumlah Anggota Kopwan

Anggota Kopwan dari 33 provinsi di Indonesia berjumlah 290.740 orang. Rata-rata jumlah anggota per koperasi sebanyak 165 orang. Jumlah anggota Kopwan terbesar antara 40–200 orang yaitu kurang lebih sekitar 71%. Terdapat kecenderungan bahwa Kopwan yang berjumlah anggota besar (lebih di atas 180 anggota kopwan) persentasenya kecil yang berarti bahwa jika skala Kopwan ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya, maka jumlah Kopwan dengan skala yang besar persentasenya kecil. Hal ini sesuai dengan keadaan lapangan bahwa jumlah anggota Kopwan memang relatif sedikit dibanding dengan koperasi biasa. Sekalipun jumlahnya sedikit, namun pelayanan koperasi tetap konsisten dan berkelanjutan sehingga ukuran jumlah anggota yang besar bukan merupakan indikator keberhasilan koperasi yang memadai. Dengan kata lain jumlah Kopwan yang berhasil menjadi besar (dari sisi jumlah anggotanya) di Indonesia kecil jumlahnya.

2.4 Varian Usaha Kopwan

Dari total jumlah Kopwan yang ada, maka jenis kegiatan Kopwan yang terbanyak adalah jenis kegiatan simpan pinjam sebanyak 65%, usaha serba usaha (22%), konsumsi (4%), produksi (1%), dan 8% lainnya tidak memberikan data. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya Kopwan mengawali kegiatannya dengan unit simpan pinjam. Kemudian Kopwan mengembangkan usahanya ke serba usaha dengan berbagai kegiatan, seperti pengadaan berbagai kebutuhan pokok dalam waserda, usaha produksi (misalnya batik) dan kredit konsumsi (kredit yang lebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, sakit), kegiatan jasa (pendidikan; pendirian TK/Taman Kanak-kanak). Kecenderungan jenis usaha tersebut menunjukkan tidak saja jenis usaha simpan pinjam secara ekonomi menguntungkan tetapi juga sekaligus menggambarkan kebutuhan riil dari sebagian besar perempuan anggota koperasi.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat Kopwan melalui usaha simpan pinjam sangat tepat dalam rangka mengerakkan ekonomi di tingkat paling bawah. Namun komitmen itu harus benar-benar diwujudkan dan mengikuti perkembangan Kopwan. Karena keberhasilan tidak boleh mendadak jika

Kopwan selama ini tumbuh secara alami dan tahan terpaan krisis. Pemerintah, karenanya, hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berakar dan kuat melalui perencanaan yang matang.

2.5 Penyelenggaraan RAT Kopwan

Dari data temuan diketahui bahwa masih banyak Kopwan yang belum mampu melaksanakan RAT karena skala usahanya masih kecil. Alasan lain adalah selain karena penyelenggaraan RAT membutuhkan biaya yang cukup besar juga karena sebagian Kopwan memang kurang disiplin untuk mentaati aturan RAT tersebut. Di satu sisi RAT merupakan petunjuk berjalannya roda organisasi, dan itulah sebabnya indikator ini menjadi status keaktifan koperasi sebagaimana halnya koperasi lain, sementara di sisi lain masih banyak Kopwan yang belum melakukan RAT. Bagi yang belum melaksanakan RAT perlu diketahui dan dibina agar melakukan RAT.

2.6 Modal dan Volume Usaha Kopwan

Secara umum, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Berdasarkan hasil pendataan ini memperlihatkan bahwa total modal Kopwan dari 33 propinsi berjumlah Rp. 1,9 trilyun (modal sendiri dan modal luar). Jumlah tersebut terdiri dari total modal sendiri berjumlah Rp. 926.056.204.000 atau (51,24%), dan total modal dari luar berjumlah Rp. 905.507.288.000 atau sebesar (48,76%). Sedangkan total volume usaha seluruh Kopwan di 31 provinsi sebesar Rp. 1.401 trilyun. Volume usaha rata-rata per koperasi Rp. 1,856 juta. Persentase tertinggi (kurang lebih 21%) adalah Kopwan dengan besaran volume usaha Rp. 20 juta, Rp. 40 juta (sekitar 14%) dan volume usaha lebih dari Rp. 560 jutaan sebesar (12%). Sementara persentase volume usaha Kopwan lainnya sangat variatif berkisar antara Rp. 60 jutaan–Rp. 560 jutaan. Dengan gambaran besaran volume usaha yang dimiliki Kopwan tersebut, maka sebagian besar Kopwan dapat digolongkan sebagai pengusaha mikro.

2.7 Gambaran Keuangan Kopwan

Kajian terdahulu, secara kuantitatif, menggambarkan bahwa rentabilitas idealnya dapat menunjukkan kemampuan Kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Rentabilitas Kopwan rata-rata sebesar 5-10 persen (60%). Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan Kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan masih sangat rendah. Kondisi Kopwan yang ada saat ini cenderung berjalan namun tidak memberikan akumulasi keuntungan yang besar bagi Kopwan.

Dalam jangka panjang hal ini penting menjadi perhatian tidak hanya secara internal untuk Kopwan tetapi juga untuk pembina koperasi dan lembaga yang berkompeten membinanya. Karenanya, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan usaha sehingga kemampuan Kopwan untuk mengembangkan usaha dapat ditingkatkan dari kondisi saat ini. Koperasi wanita ini telah memberikan dampak positif bagi anggota. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan modal, volume usaha juga berdampak positif bagi sumber daya manusia baik pengurus, karyawan maupun anggotanya. Selain itu koperasi wanita ini juga berdampak sebagai wadah pembelajaran dan lahirnya pemimpin formal dari koperasi ini.

2.8 Potensi Perempuan Pengusaha

Perempuan, yang berjumlah separuh dari penduduk Indonesia, memiliki potensi yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Potensi dan peran perempuan bukan sesuatu yang masih diperdebatkan karena sejak seratus tahun yang lalu perempuan Indonesia telah ikut berjuang melawan penjajah dan ikut mendorong kemajuan bangsa melalui perannya sebagai ibu dan pendidik anaknya. Pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini, perempuan telah banyak bergerak hampir di semua bidang. Namun potensi yang dimiliki perempuan sering terabaikan karena faktor budaya dan struktur yang terbentuk di lingkungan masyarakat.

Dalam masyarakat tradisional, perempuan biasanya telah memanfaatkan sumber daya sekitar dan menggunakan kearifan lokal untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Namun dalam dunia modern, peran-peran tradisional tersebut tetap menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menyikapi perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Industri-industri kerajinan rumah, tenun, batik, jamu, makanan khas daerah, hingga perdagangan umum dan industri jasa telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Perempuan terjun menjadi pengusaha dan di berbagai belahan dunia, perempuan pengusaha umumnya menjadi pengusaha yang berhasil. Fischer (1993) menilai keberhasilan ini karena perempuan ternyata lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan bisnisnya dan sama efektifnya seperti laki-laki. Perempuan pengusaha cenderung lebih sadar akan resiko atas pertumbuhan yang cepat dan lebih memilih perkembangan usaha yang perlahan tetapi berlanjut. Kecenderungan ini dinilai para peneliti (Cliff, 1998; Watson dan Robinson, 2002) bahwa perempuan pengusaha

cenderung untuk membatasi usahanya dan mengurangi pertenggaran atau ketidaksepahaman di tempat kerja.

Penelitian yang dilakukan ADB (2001) di dua kota besar di Indonesia menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan pengusaha merupakan manajer yang baik dan sangat berhati-hati dalam mengembangkan bisnisnya. Survey yang dilakukan ADB (2002) setahun kemudian terhadap usaha kecil dan menengah menunjukkan ternyata pertumbuhan usaha yang dikelola perempuan lebih maju dari pada usaha yang dikelola laki-laki. Keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang dikelola oleh perempuan tidak berbeda dengan yang dikelola laki-laki. (Hamilton, 2002) Bisnis yang dikelola perempuan memang cenderung lebih kecil, tetapi bukan berarti dikelola dengan manajemen asal-asalan, karena seperti diuraikan di atas perempuan pengusaha cenderung menjaga bisnisnya tidak tumbuh besar. Hamilton juga menemukan perempuan pengusaha akan berhadapan dengan berbagai permasalahan termasuk untuk mendapatkan kredit dan pengembangan usaha.

Untuk alasan-alasan tertentu, perempuan pengusaha tidak memfokus untuk pengembangan usahanya, tetapi lebih pada penataan administrasi untuk kepuasannya dalam melakukan usaha. Lebih lanjut, keputusan yang diambil oleh perempuan pengusaha untuk membatasi pertumbuhan usahanya harus dilihat sebagai pandangan yang lebih luas daripada hanya melihat pada masalah pembiayaan, ekonomi atau pertumbuhan semata. Perempuan memiliki karakter yang lebih termotivasi oleh tujuan-tujuan yang tidak ekonomi dibandingkan laki-laki, oleh sebab itu mereka kurang agresif dan tidak terlalu melihat pada strategi pertumbuhan usaha (Chaganti, 1986).

Perempuan pengusaha juga cenderung untuk melakukan bisnis dan urusan rumah tangga bersama-sama. Mungkin ini merupakan hal yang logis sebagai konsekuensi sebagai seorang ibu tentu menghendaki adanya keseimbangan antara pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Apalagi dalam budaya patriarkhi, tentu peran perempuan masih sering dibedakan dan dipisahkan. Potensi tersebut di atas menyangkut perempuan sebagai individu dan pengusaha. Dari sisi koperasi, koperasi wanita juga mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya. Itu sebabnya sebutan koperasi wanita, yang dianggap sudah terlanjur diberikan dan melekat pada koperasi yang dikelola oleh perempuan, seolah-olah memiliki karakter dan sifat tersendiri. Sebenarnya koperasi wanita sama saja dengan koperasi-koperasi lainnya, hanya karena keistimewaannya yang dikelola dan

beranggotakan paraperempuan, maka terkesan koperasi wanita menjadi lain.

Koperasi wanita yang cenderung mentaati peraturan dan melaksanakan jati dirinya berarti bahwa koperasi ini mengenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Misalnya, dalam koperasi wanita, perempuan dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan dana semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya. Koperasi wanita pada umumnya sangat berpengalaman dalam aktivitas simpan pinjam yang sudah menjadi dasar dari pembentukan koperasi di kalangan perempuan. Dari sejumlah pendataan yang dilakukan beberapa lembaga diketahui bahwa koperasi wanita umumnya berawal dari kelompok arisan dan kegiatan simpan pinjam diantara anggota arisan.

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola oleh wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik.

Koperasi wanita yang berkembang adalah koperasi yang konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan Kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa Kopwan yang cukup berkembang seperti Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU.

2.9 Memilih Koperasi Wanita

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Hubungan timbal balik yang demikian merefleksikan hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung.

Kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap

koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jeni kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2.10 Peran Pemerintah dalam Memacu Koperasi

Pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pentingnya peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam ketahanan perekonomian nasional. Komitmen yang demikian ditunjukkan bagaimana Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan layanan kepada UMKM ini. Lembaga-lembaga peneliti dan lembaga swadaya masyarakat telah banyak melakukan kajian dan pendampingan langsung kepada koperasi wanita. Namun sayang potensi koperasi wanita belum menjadi perhatian dan fokus semua pihak. Kondisi ini kemudian direspons oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) dan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro Indonesia (FP3MI) dengan melakukan koordinasi dan penggalangan opini tentang kemampuan perempuan pengusaha.

Kemampuan perempuan pengusaha yang menjadi potensi berkembangnya koperasi wanita sekaligus menjadi target kementerian. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi wanita untuk lebih agresif bergerak dalam penyaluran dana bergulir melalui Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM), program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA). Kementerian Perdagangan dan Perindustrian memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kelompok perempuan dalam aspek perdagangan dan industri. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan perhatian kepada kelompok perempuan yang dilatih untuk memproduksi dan menjalankan aktivitas simpanpinjam untuk selanjutnya dihubungkan dengan program-program yang ada dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kerjasama dan koordinasi sudah mulai terjalin.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perbankan, perguruan tinggi,

dunia usaha juga perlu digalang untuk mengefektifkan pemberdayaan perempuan. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana-dana programnya melalui Bank Pembangunan Daerah setempat, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, koperasi wanita senantiasa akan berhubungan terus dengan pihak bank-bank terkait untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa Timur tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah kehadiran program penumbuhan Koperasi Wanita di Jawa Timur di setiap desa/kelurahan. Sejumlah 8.506 Kopwan menadapat bantuan dari APBD. Tiap-tiap Kopwan mendapat suntukan dana Rp.25 jutaan, dan 2.000 kopwan yang berkinerja cukup baik mendapat tambahan bantuan. Bantuan tambahan masing-masing 25 jutaan merupakan dana stimulan bagi suatu organisasi di setiap kelurahan/desa di Jawa Timur untuk menambah gairah bagi anggota Kopwan dalam melakukan kegiatan wirausaha demi meningkatkan produksinya karena kebutuhan modal dapat diakses dengan mudah dan tanpa agunan/jaminan tidak seperti lembaga-lembaga lain yang mempersyaratkan jaminan. Untuk memantapkan usaha simpan pinjam Koperasi Wanita yang berkinerja baik, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi konsultasi manajemen usaha simpan pinjam bagi Kopwan yang berkinerja baik di Jawa Timur dan masing-masing kegiatan meliputi 100 Kopwan.